JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN

Ahmad Rahmani[1], Agus Surya Dharma[2], Herry Febriadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : rahmaninani9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila (PIPP) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 mengamanatkan penguatan ideologi Pancasila secara terencana dan sistematis di seluruh lapisan masyarakat. Namun, Kabupaten Balangan menghadapi tantangan berupa rendahnya indeks pembangunan manusia, kerentanan terhadap paparan radikalisme, dan kesenjangan akses informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi David C. Korten (1980) yang menekankan tiga elemen: kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIPP di Kabupaten Balangan telah berjalan cukup baik pada aspek kesesuaian output program, kejelasan mekanisme pelaksanaan, cakupan program, kompetensi pelaksana, struktur organisasi, kepemimpinan, sistem komunikasi, kesesuaian kebutuhan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, ketersediaan sumber daya dan aksesibilitas masih menjadi kendala utama, terutama terkait keterbatasan anggaran, jumlah personel, dan hambatan geografis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi kampanye digital, dan peningkatan kapasitas SDM untuk menjangkau wilayah pelosok.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penguatan Ideologi Pancasila, Kesbangpol, David C. Korten, Administrasi Publik

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Pancasila Ideology Strengthening Program (PIPP) by the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Balangan Regency and identify the influencing factors. BPIP Regulation Number 4 of 2024 mandates the systematic strengthening of Pancasila ideology across all levels of society. However, Balangan Regency faces challenges such as low human development index, vulnerability to radicalism exposure, and information access disparity. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model with credibility testing through source and technique triangulation. The analytical framework refers to David C. Korten's (1980) implementation theory emphasizing three elements: program-beneficiary compatibility, program-implementing organization compatibility, and beneficiary group-implementing organization compatibility. The results show that PIPP implementation in Balangan Regency has proceeded reasonably well regarding program output suitability, implementation mechanism clarity, program coverage, implementer competence, organizational structure, leadership, communication systems, needs compatibility, and community participation levels. However, resource availability and accessibility remain major constraints, particularly regarding budget limitations, personnel shortages, and geographical barriers. This study recommends strengthening cross-sector collaboration, optimizing digital campaigns, and enhancing human resource capacity to reach remote areas.

Keywords: *Policy Implementation, Pancasila Ideology Strengthening, Kesbangpol, David C. Korten, Public Administration*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya dirancang untuk merekatkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun, di era globalisasi dan disrupsi digital saat ini, ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin nyata. Radikalisme, penyebaran hoaks, dan polarisasi sosial masih berlangsung secara sistemik, menggerus pemahaman substantif terhadap nilai-nilai Pancasila dan berpotensi melemahkan ikatan kebangsaan.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat meluncurkan Program Penguatan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2024). Regulasi ini menetapkan pedoman strategis yang terencana, sistematis, dan terpadu untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. PIPP hadir sebagai kerangka kebijakan nasional yang tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menghendaki transformasi nyata dalam pembentukan karakter bangsa yang tangguh terhadap pengaruh ideologi transnasional dan disinformasi.

Pada tingkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi leading sector dalam implementasi PIPP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kesbangpol dan dipertegas dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan (Republik Indonesia, 2019). Kabupaten Balangan merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki keragaman sosial-budaya khas, dengan mayoritas masyarakat bersuku Dayak dan beragama Islam. Karakteristik ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam merawat kohesi sosial.

Kondisi objektif Kabupaten Balangan menunjukkan sejumlah kerentanan yang perlu diwaspadai. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan tahun 2024 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,83 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2024), masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 75,19, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 2,69%. Meskipun TPT relatif rendah, kesenjangan ekonomi dan rendahnya IPM menciptakan kerentanan sosial-ekonomi yang dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya konflik horizontal, terlebih dengan adanya migrasi penduduk dari luar daerah yang turut mengubah dinamika sosial setempat. Survei yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mengungkap bahwa hanya 65% masyarakat Balangan memahami sila-sila Pancasila secara mendalam, menandakan rendahnya literasi ideologi di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila menghadapi tantangan multidimensional. Simbolon *et. al.* (2025) mengidentifikasi bahwa secara historis implementasi Pancasila mengalami fluktuasi signifikan, di mana pada masa Orde Baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang represif, sementara di era Reformasi justru mengalami marginalisasi. Tantangan kontemporer terbesar berasal dari globalisasi dan revolusi digital yang membawa nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan liberalisme ekstrem yang berpotensi menggerus semangat persatuan dan keadilan sosial. Az-zahra *et. al.* (2025) menambahkan bahwa tantangan dalam membumikan Pancasila meliputi pemahaman Pancasila yang dangkal, eksklusivisme sosial, kesenjangan sosial, pelembagaan Pancasila yang lemah, dan kurangnya keteladanan Pancasila.

Penelitian tentang peran Kesbangpol dalam penanggulangan radikalisme oleh Rotama (2020)menunjukkan bahwa instansi ini memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan pencegahan

paham radikal di masyarakat. Sementara itu, dalam kajian yuridisnya, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk membantu pemerintah mencapai tujuan negara melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Secara teoretis, implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara program dengan pemanfaat, program dengan organisasi pelaksana, dan kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana (Korten, 1980). Dalam konteks penguatan ideologi, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tetapi juga sebagai ideologi dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila oleh Kesbangpol Kabupaten Balangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program, serta mengukur dampak program terhadap penguatan karakter kebangsaan di Kabupaten Balangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang penguatan ideologi negara, serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan program di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila secara mendalam dalam konteks alamiahnya (Creswell and Creswell, 2018). Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta sumber sekunder berupa dokumen dan laporan terkait. Pemilihan 10 informan dilakukan secara *purposive*, meliputi Plt. Kepala Badan, Kepala Bidang Ideologi, dua staf bidang, dan enam masyarakat partisipan program, dengan pertimbangan bahwa mereka paling mengetahui objek penelitian.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung kegiatan program, wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi implementasi, dan dokumentasi resmi serta arsip kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian naratif sistematis, dan penarikan kesimpulan berkelanjutan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, serta member check untuk menjamin keabsahan temuan (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

1. Program

a. Kesesuaian Output Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian output program Penguatan Ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan telah berjalan dengan baik. Temuan ini didasarkan pada pernyataan informan kunci yang mengungkapkan bahwa program pembinaan ideologi dan

wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui beragam pendekatan, mulai dari sosialisasi, dialog kebangsaan, hingga festival kebangsaan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Bentuk konkret program seperti pelatihan kader bela negara dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dinilai mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan pemahaman ideologi yang substantif dan aplikatif. Observasi lapangan memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa output program dirancang secara sistematis untuk membentuk karakter kebangsaan yang tangguh, terutama di kalangan pemuda dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Temuan ini secara tegas memperkuat kerangka teoritis David C. Korten (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian antara desain program dengan kebutuhan pemanfaat. Dalam konteks ini, program penguatan ideologi Pancasila telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai normatif Pancasila menjadi kegiatan-kegiatan operasional yang terukur dan kontekstual. Kesesuaian output program dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 menunjukkan bahwa program tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, dimensi program dalam teori Korten terbukti menjadi fondasi penting yang menentukan arah dan kualitas implementasi kebijakan penguatan ideologi di tingkat lokal.

b. Kejelasan Mekanisme Pelaksanaan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan telah dirancang secara terencana dan terarah. Temuan ini terlihat dari adanya tahapan pemetaan kondisi sosial masyarakat yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, melibatkan koordinasi intensif dengan kecamatan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Proses pemetaan ini tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan dijadikan basis pengambilan keputusan strategis untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang memerlukan pendekatan lebih intensif. Metode pelaksanaan juga menunjukkan fleksibilitas tinggi dengan membedakan pendekatan antara audiens formal seperti tokoh masyarakat melalui seminar dan dialog, serta audiens muda melalui kegiatan sosiokultural yang interaktif seperti lomba dan festival kebangsaan.

Temuan ini memperkuat konsep implementasi sebagai sistem rekayasa yang dikemukakan oleh Mulyasa dan para ahli lainnya, di mana implementasi dipahami bukan sekadar aktivitas teknis melainkan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu. Kejelasan mekanisme yang terstruktur namun adaptif ini sejalan dengan prinsip mutual adaptation dalam teori Korten, (1980) yang menekankan perlunya penyesuaian dinamis antara karakteristik program dengan realitas lapangan. Dalam konteks penguatan ideologi di Kabupaten Balangan, kemampuan organisasi pelaksana untuk menyesuaikan mekanisme dengan kondisi sosiokultural masyarakat menjadi kunci efektivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik yang berhasil tidak hanya memerlukan prosedur baku, tetapi juga kapasitas organisasi untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

c. Ketersediaan Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan masih menghadapi kendala

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

signifikan. Temuan ini terungkap dari adanya ketimpangan yang tajam antara volume kegiatan yang luar biasa banyak dengan dukungan finansial yang sangat terbatas. Meskipun secara kinerja organisasi mampu menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak dan optimalisasi jangkauan program secara ideal. Jumlah personel yang tersedia, meskipun cukup untuk menangani pekerjaan administratif harian, masih belum memadai jika dihadapkan pada luasnya wilayah Kabupaten Balangan yang terdiri dari delapan kecamatan dengan topografi yang beragam. Kekurangan tenaga lapangan yang memiliki kompetensi komunikasi sosial dan pemahaman pendekatan persuasif terhadap masyarakat adat atau komunitas lokal menjadi hambatan serius dalam menjangkau sasaran program secara menyeluruh.

Temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan salah satu prasyarat keberhasilan implementasi dalam teori David C. Korten (1980), yang menekankan bahwa organisasi pelaksana harus memiliki sumber daya yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kekurangan sumber daya ini berimplikasi pada terbatasnya cakupan intervensi dan kualitas pendampingan yang dapat diberikan kepada masyarakat sasaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan implementasi kebijakan dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia, sebagaimana juga diidentifikasi dalam berbagai studi implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian, meskipun aspek desain program dan mekanisme pelaksanaan telah berjalan baik, keterbatasan sumber daya tetap menjadi faktor penghambat utama yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program penguatan ideologi Pancasila di masa mendatang.

d. Cakupan Program

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa cakupan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan tergolong baik dengan pendekatan yang variatif dan komprehensif. Temuan ini terlihat dari pengklasifikasian program ke dalam empat instrumen utama yang saling melengkapi, yaitu instrumen edukatif dan teoritis melalui seminar dan sosialisasi, instrumen pembentukan karakter dan kaderisasi melalui Paskibraka dan pelatihan kader bela negara, instrumen penguatan wadah dan sinergi sosial melalui Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta instrumen kreatif dan partisipatif melalui lomba dan festival kebangsaan. Strategi diferensiasi metode ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi pelaksana untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik audiens, di mana untuk audiens formal digunakan metode seminar dan dialog kebangsaan, sementara untuk audiens muda digunakan metode sosiokultural yang lebih interaktif dan menarik minat generasi milenial dan Gen Z.

Temuan ini memperkuat konsep program sebagai seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan pada audiens yang teridentifikasi, sebagaimana didefinisikan oleh Smith. Cakupan program yang luas dan bervariasi ini sejalan dengan pandangan Oetojo Oesman yang menekankan bahwa ideologi Pancasila perlu memiliki dimensi fleksibilitas agar dapat berkembang tanpa kehilangan jati diri esensialnya. Dalam konteks Kabupaten Balangan yang memiliki keragaman sosial-budaya khas, kombinasi instrumen edukatif, kaderisasi, kelembagaan, dan partisipatif meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan program, yaitu peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, pembentukan kapasitas lokal, dan penguatan kohesi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan program yang baik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan, tetapi juga oleh

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

kemampuan organisasi untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat.

2. Organisasi Pelaksana

a. Kompetensi Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pelaksana program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan secara umum sudah baik, ditandai oleh kemampuan petugas di lapangan yang komunikatif, ramah, dan mampu menyajikan materi secara mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat program memberikan penilaian positif terhadap narasumber yang dihadirkan, yang dinilai kompeten di bidangnya dengan materi yang relevan dengan kondisi Balangan saat ini. Kemampuan pelaksana untuk melakukan pendekatan persuasif dan dialogis dalam kegiatan seminar, diskusi, dan sosialisasi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim komunikasi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dalam aspek pemahaman substantif dan manajerial, mengingat penanganan isu-isu ideologi bersifat kompleks dan multidisipliner yang membutuhkan keahlian analitis dan strategis yang mendalam.

Temuan ini mendukung teori Korten yang menekankan pentingnya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, di mana kompetensi individu pelaksana menjadi elemen krusial dalam keberhasilan implementasi. Meskipun secara umum kompetensi dasar pelaksana telah memadai, pengakuan dari pimpinan organisasi bahwa kompetensi dari pendidikan belum ideal karena sifat pekerjaan di Kesbangpol yang bersifat umum dan membutuhkan berbagai disiplin ilmu menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur birokrasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan kebijakan publik kontemporer. Dengan demikian, peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional tidak hanya akan memperkuat kualitas pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik.

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja pelaksana program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan secara umum sudah baik, dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021. Temuan ini terlihat dari peran utama Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam pelaksanaan program, sementara bidang lain memberikan dukungan dari sisi koordinasi dan administrasi. Yang menarik, efektivitas program lebih banyak didorong oleh inisiatif personal petugas di lapangan dalam memangkas alur birokrasi sehingga pelayanan terasa lebih responsif dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat. Fleksibilitas ini terlihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap layanan program serta cara kerja yang adaptif dalam menyesuaikan prosedur formal dengan kebutuhan lapangan, yang pada gilirannya menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja organisasi.

Temuan ini menunjukkan adanya dinamika menarik antara struktur formal dan praktik informal dalam implementasi kebijakan publik. Meskipun secara struktural organisasi telah memiliki pembagian tugas yang jelas, keberhasilan program justru banyak bertumpu pada kemampuan individu pelaksana untuk menavigasi birokrasi dengan cara-cara yang lebih fleksibel dan responsif. Fenomena ini memperluas pemahaman terhadap

teori Korten dengan menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pelaksana tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan struktur formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi untuk mengembangkan tata kerja yang adaptif dan komunikatif. Hal ini sejalan dengan konsep birokrasi yang melayani (*service bureaucracy*) di mana prosedur formal difungsikan sebagai kerangka kerja, namun pelaksanaan di lapangan tetap memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian kontekstual. Dengan demikian, struktur organisasi dan tata kerja yang baik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap dinamika kebutuhan publik.

c. Kepemimpinan dan Motivasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi dalam pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan berada pada tingkat yang baik. Temuan ini terlihat dari praktik manajerial yang membangun iklim kerja terukur melalui sistem perjanjian kinerja dan koordinasi rutin antar-bidang, yang menciptakan kepemimpinan tidak hanya bersifat instruksional tetapi juga kolaboratif. Masyarakat menilai bahwa narasumber dan pimpinan yang hadir selalu memberikan motivasi yang tidak membosankan, dengan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi sosial Kabupaten Balangan saat ini. Kesesuaian isi program dengan kebutuhan lokal serta keterlibatan tokoh dan pemangku kepentingan setempat memperkuat relevansi dan daya tarik intervensi, sehingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Secara internal, kejelasan target dan tanggung jawab melalui perjanjian kinerja menciptakan motivasi yang kuat di kalangan pelaksana program untuk mencapai hasil yang optimal.

Temuan ini secara kuat mendukung teori Korten yang menekankan pentingnya kepemimpinan dan motivasi dalam organisasi pelaksana sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. Kepemimpinan kolaboratif yang diterapkan di Kesbangpol Balangan mencerminkan pendekatan kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi bawahan untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan organisasi. Motivasi yang terbangun di kalangan masyarakat melalui relevansi program dengan kebutuhan riil juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, kepemimpinan berperan sebagai katalis yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, kombinasi kepemimpinan inklusif, perencanaan yang relevan dengan kondisi lokal, dan mekanisme manajerial yang terukur telah menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan.

d. Sistem Komunikasi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem komunikasi dalam pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan secara umum sudah baik. Temuan ini terlihat dari penyediaan beragam kanal informasi yang mudah diakses oleh publik, baik melalui platform digital seperti media sosial, website, dan E-lapor, maupun melalui koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan di lapangan. Masyarakat menilai bahwa koordinasi dengan Kesbangpol tergolong mudah dan tidak berbelit-belit, dengan keterbukaan untuk menerima saran dan kritik sebagai bahan evaluasi program. Meskipun beberapa kegiatan menunjukkan nuansa formalitas birokratis, pendekatan dialogis yang diterapkan oleh narasumber dan staf lapangan mampu menyeimbangkan

kebutuhan prosedural dengan ruang dialog publik. Sikap komunikatif petugas dan penggunaan metode yang adaptif membuat pesan penguatan ideologi Pancasila tersampaikan secara luwes dan mudah diterima oleh berbagai segmen masyarakat, mulai dari tokoh adat hingga generasi muda.

Temuan ini memperkuat teori Korten (1980) yang menekankan pentingnya sistem komunikasi sebagai elemen kunci dalam kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Sistem komunikasi yang terbuka dan multidirectional tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi pelaksana untuk menangkap aspirasi, keluhan, dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks penguatan ideologi, kemampuan organisasi untuk mendengarkan dan merespons masukan masyarakat menjadi sangat penting karena ideologi bukanlah konsep abstrak yang dapat dipaksakan dari atas, melainkan nilai yang harus dihayati dan diamalkan secara kolektif. Temuan ini juga sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menekankan pentingnya dialog dan partisipasi dalam proses sosialisasi kebijakan publik. Dengan demikian, sistem komunikasi yang baik di Kesbangpol Balangan telah berhasil menciptakan ruang publik yang memungkinkan terjadinya interaksi bermakna antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama memperkuat ideologi Pancasila di tingkat lokal.

3. Kelompok Sasaran

a. Kesesuaian Kebutuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan berada pada tingkat yang baik. Temuan ini terlihat dari strategi diferensiasi metode yang diterapkan Kesbangpol, di mana pendekatan interaktif berbasis media sosial digunakan untuk pelajar dan pemuda, sementara forum dialog formal diterapkan bagi tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat menilai bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat dan dibutuhkan, dengan materi yang relevan dan sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Keterbukaan kanal komunikasi dan ruang partisipasi publik membuat program tidak sekadar informatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penanganan masalah sosial yang aktual, seperti isu radikalisme dan aliran-aliran baru yang menjadi polemik di masyarakat. Responsivitas organisasi terhadap kebutuhan spesifik setiap kelompok sasaran ini menjadi kunci efektivitas program dalam menjawab keresahan sosial yang muncul.

Temuan ini secara kuat mendukung teori Korten yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh seberapa akurat program mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memuaskan asumsi atau rencana kaku di atas kertas. Kemampuan Kesbangpol Balangan untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat menunjukkan adanya kapasitas organisasi untuk melakukan penyesuaian kontekstual yang merupakan inti dari pendekatan implementasi adaptif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa dalam kebijakan publik yang efektif, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pasif penerima program, melainkan sebagai subjek yang memiliki kebutuhan dan aspirasi yang harus dipahami dan diakomodasi. Dengan demikian, kesesuaian kebutuhan yang baik dalam program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa organisasi pelaksana telah berhasil menjembatani antara tujuan kebijakan nasional dengan realitas sosial lokal, sehingga program tidak kehilangan relevansi dan daya guna di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

b. Tingkat Partisipasi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan sudah baik. Temuan ini terlihat dari keterbukaan Kesbangpol dalam menerima saran, kritik, konsultasi, dan usulan masyarakat, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Masyarakat mengakui bahwa mereka tidak hanya diminta hadir sebagai peserta pasif, tetapi diajak untuk mengonsep bagaimana materi Pancasila bisa masuk ke kalangan anak muda melalui media sosial atau diskusi santai. Kemudahan akses untuk konsultasi administrasi, pengajuan usulan kegiatan kemitraan, dan diskusi isu strategis membuat masyarakat lebih leluasa terlibat dalam proses program. Hambatan birokrasi dalam penyampaian aspirasi dinilai dapat diminimalkan dengan baik, sehingga partisipasi publik tidak hanya bersifat simbolik tetapi benar-benar mendukung tujuan program dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kebijakan.

Temuan ini memperkuat teori Korten (1980) yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator kunci keberhasilan implementasi. Partisipasi yang substansial, bukan sekadar kehadiran fisik, mencerminkan adanya pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat untuk ikut menentukan arah program. Hal ini sejalan dengan konsep koproduksi dalam administrasi publik, di mana keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks penguatan ideologi Pancasila, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang disosialisasikan. Dengan demikian, tingkat partisipasi yang baik di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa program penguatan ideologi Pancasila telah berhasil menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menjadi agen perubahan, bukan sekadar objek penerima manfaat, yang pada gilirannya memperkuat fondasi ketahanan ideologi di tingkat lokal.

c. Aksesibilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan masih belum sepenuhnya baik, meskipun secara institusional Kesbangpol telah dinilai mampu menjadi institusi yang terbuka dan mudah dijangkau. Temuan ini mengungkapkan bahwa secara praktik, tantangan utama masih terletak pada pemerataan jangkauan hingga wilayah pelosok serta pada kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara berkelanjutan. Faktor geografis berupa luasnya wilayah dengan topografi yang ekstrem dan jarak antar-pemukiman yang berjauhan menjadi hambatan fisik yang signifikan, menyebabkan masyarakat di daerah pelosok enggan menghadiri kegiatan karena sulitnya akses dan keterbatasan sarana transportasi publik. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil turut memengaruhi partisipasi, seperti yang terlihat pada program Paskibraka di mana tinggi rata-rata peserta di bawah standar karena faktor kesehatan dan ekonomi yang belum memadai.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori Korten yang menekankan bahwa kelompok sasaran harus memiliki akses yang memadai terhadap program agar implementasi dapat berhasil. Aksesibilitas yang rendah menciptakan kesenjangan penerimaan manfaat antara wilayah yang mudah diakses dengan wilayah pelosok, sehingga program yang baik sekalipun akan gagal karena tidak dapat dijangkau

oleh masyarakat yang membutuhkannya. Hambatan geografis dan ekonomi ini merupakan faktor kontekstual yang sering kali luput dari perhatian dalam perencanaan kebijakan, namun memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih spesifik dan inovatif untuk mengatasi hambatan akses, seperti penguatan kolaborasi dengan dinas-dinas lain yang memiliki agenda turun ke desa, optimalisasi kampanye digital yang dapat menembus sekat geografis, serta pemberian insentif bagi masyarakat dari wilayah terpencil untuk berpartisipasi. Dengan demikian, meskipun institusi telah membuka ruang komunikasi dan prosedur yang lebih mudah dijangkau, kondisi geografis Kabupaten Balangan yang menantang menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif agar manfaat program penguatan ideologi Pancasila benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Implementasi program penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Balangan menghadapi tiga hambatan utama yang saling terkait. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah personel yang minim tidak sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah, menyebabkan pengawasan dan pendampingan menjadi kurang optimal. Kedua, keterbatasan anggaran memaksa pemangkasan skala prioritas, mengurangi intensitas kegiatan di lapangan, serta membatasi pengadaan sarana penunjang sehingga banyak program pembinaan tidak dapat terakomodasi secara maksimal. Ketiga, hambatan geografis berupa topografi ekstrem, jarak antar-pemukiman yang berjauhan, dan infrastruktur jalan yang terbatas meningkatkan biaya operasional, memperlambat distribusi logistik, dan menurunkan partisipasi masyarakat pelosok yang enggan hadir karena sulitnya akses transportasi. Kondisi ini memaksa pelaksana menerapkan sistem jemput bola dengan efisiensi terbatas, sehingga kesenjangan penerimaan manfaat antara wilayah mudah dijangkau dan daerah terpencil tetap tinggi.

Dalam kerangka teori implementasi David C. Korten (1980), temuan ini menegaskan bahwa meskipun aspek program dan organisasi pelaksana telah berjalan cukup baik ditandai dengan desain kegiatan yang sesuai kebutuhan kelompok sasaran, struktur kerja yang jelas, kepemimpinan kolaboratif, dan komunikasi terbuka elemen kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi masih terkendala serius pada dimensi aksesibilitas. Ketiga hambatan sumber daya dan geografis tersebut secara langsung menggagalkan pemerataan jangkauan program, sehingga keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat dijangkau dan diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan berketerbatasan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kontekstual yang tidak hanya mengandalkan kesesuaian desain program dan kapasitas organisasi, tetapi juga secara serius mengakomodasi faktor geografis, infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah, sejalan dengan pendekatan holistik yang menekankan sinergi pendidikan, keteladanan, dan pelembagaan nilai secara inklusif.

SIMPULAN

Implementasi Program Penguatan Ideologi Pancasila pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Dari tiga elemen implementasi menurut David C. Korten, aspek program dan aspek organisasi pelaksana dinilai baik, sementara aspek kelompok sasaran masih menghadapi tantangan signifikan. Pada aspek program, kesesuaian output, kejelasan mekanisme, dan cakupan

kegiatan telah disesuaikan dengan karakteristik sasaran, namun terkendala keterbatasan sumber daya. Pada aspek organisasi, kompetensi pelaksana, struktur kerja, kepemimpinan kolaboratif, dan sistem komunikasi terbuka sudah berjalan dengan baik. Adapun pada aspek kelompok sasaran, kesesuaian kebutuhan dan partisipasi masyarakat tergolong baik, tetapi aksesibilitas masih menjadi kendala utama.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan hambatan geografis. Jumlah personel yang belum mencukupi serta alokasi dana yang tidak sebanding dengan volume kegiatan menjadi penghambat internal yang signifikan. Sementara itu, kondisi topografi ekstrem, jarak antar-pemukiman yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur dan ekonomi masyarakat membatasi jangkauan program secara merata, terutama di wilayah pelosok. Ketiga faktor ini saling terkait dan secara langsung membatasi optimalisasi program dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Esensi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah kegiatan, melainkan dari sejauh mana program tersebut dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif untuk memastikan penguatan ideologi Pancasila benar-benar membumi di seluruh Kabupaten Balangan, seperti penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi kampanye digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Az-zahra, A. (2025) ‘Keterkaitan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat Modern’, *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), pp. 905–911.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2024) ‘Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila’. Jakarta: BPIP.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (2024) *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan 2024*. Paringin: BPS Kabupaten Balangan.

Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Korten, D.C. (1980) ‘Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach’, *Public Administration Review*, 40(5), pp. 480–511.

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Republik Indonesia (2019) ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah’. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Rotama, D. (2020) ‘Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanggulangan Radikalisme di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Peristiwa Terorisme di Sibolga)’. Medan.

Simbolon, L.D.B. *et al.* (2025) ‘Strategi Holistik Penguatan Ideologi Pancasila: Sinergi Pendidikan, Keteladanan Elite, dan Internalisasi Nilai’, *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 2(2), pp. 363–370. Available at: https://doi.org/10.57235/arrumman.v2i2.7610.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. 28th edn. Bandung: Alfabeta.